

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakthi), hlm. 134
- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal.6
- Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Jakarta: Cipta Jaya, hlm.29
- Adrian Sutedi, *Peralihan hak Atas tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.114.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hal. 112.
- Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta), hlm. 23
- Benhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, hlm.1
- Boedi Harsono, 2002, *Hukum agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.520
- B.F Sihombing, *Evolusi Kebijakan pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2005, hal. 32
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hal. 41
- Hasan Wargakusumah (et. Al), *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2001, hal. 80.
- Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertahanan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 9.
- Muhammad Yamin Lubis & Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 171

Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar, (grand theory) dalam hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.110

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.143

Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Syrabaya Bina Ilmu, hlm 25

Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, Undip, Semarang, 1988, hal.1-3

Rahmat Ramadhani, Buku Ajar: Hukum Agraria (Suatu Pengantar), UMSU Perss, Medan, 2018

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administarsi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 277

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, hal. 1

R. Harmanses, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Ketikan Stensil, Jakarta, 1966, hal. 3.

Sajipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 53

Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Soetjinto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm 121

Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka), hlm. 4

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13

Soerjono Soekanto, 2012, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 10

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.14-16

Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hal. 106

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106.

Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, Grasindo, Jakarta, 2010, hal 56.

B. Karya Ilmiah dan Jurnal

Anggraeni Arief, *Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Jurnal Jurisprudentie, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018.

Bahder John Nasution, 2014 “*Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*”, Jurnal Yustisia, Universitas Jambi, Vol. 3 No. 2, hlm.119

Muhammad yamin dan Zaidar, *Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan*, Jurnal Hukum samudera Keadilan. Vol. 13 No.2 (Desember, 2018), hlm. 202

Rudy Patar Purwanto Purba, *Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)*, Al-Mursalah Jurnal Hukum Islam, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2020.

Setyo Anggono, *Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 1, 2019

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, “*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,*” Jurnal Imu Hukum 16, No. 1 (2020), hlm. 88.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (U.U.P.A)

Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 1997, *Agraria, Pertanahan, Pendaftaran, PPAT, UUPA, Serifikat*, Jakarta, 1997

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

D. Sumber Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu

www.labuhanbatukab.bps.go.id.

